

Bab I : PENDAHULUAN

Melewati usia kemerdekaan yang ke-50, bangsa Indonesia menapak ke Pembangunan Jangka Panjang II yang merupakan bagian dari rangkaian panjang perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-citanya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Menurut sistem konstitusi Indonesia, rakyat sendirilah yang menentukan masa depan yang dikehendakinya. Hal ini dilaksanakan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. Dengan memperhatikan perkembangan, MPR menentukan haluan-haluan negara dalam garis besar yang disebut dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Presiden sebagai mandataris MPR berkewajiban melaksanakan GBHN tersebut. GBHN pada dasarnya adalah kehendak politik, dan lebih bersifat menunjukkan arah. Untuk pelaksanaannya, GBHN kemudian dijabarkan dalam sebuah sistem perencanaan lima tahunan yang dinamakan Repelita.

Repelita, dengan berdasarkan pada arahan-arahan GBHN, mengandung sasaran-sasaran dan upaya untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Repelita tidak hanya berisi sasaran-sasaran kualitatif, tetapi juga mengandung sasaran-sasaran kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh berbagai aspirasi mengenai masa depan itu telah dapat dicapai. Selain merumuskan apa yang ingin diwujudkan, repelita juga mengenali tantangan-tantangan yang dihadapi serta kendala-kendala dan peluang-peluang untuk mengatasi tantangan itu. Jadi, repelita mengandung visi mengenai masa depan dan cara mewujudkannya. Repelita, meskipun disusun oleh pemerintah, dalam proses penyusunannya telah menampung pendapat dan masukan dari kalangan masyarakat luas. Selain itu, sebelum ditetapkan, naskah repelita dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berdasarkan pembahasan tersebut, diperbaiki lebih lanjut sehingga menjadi suatu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa repelita adalah kesepakatan nasional mengenai upaya pembangunan lima tahun ke depan.

Selanjutnya Presiden melaksanakan repelita, sebagai pengejawantahan pelaksanaan GBHN yang menjadi tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya. Pada akhir masa jabatannya, Presiden mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada MPR. Pelaksanaan repelita dalam setiap tahunnya, untuk kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selama pelaksanaannya, DPR mengawasi jalannya pembangunan. Dengan demikian, sambil berjalan dapat diadakan perbaikan-perbaikan dan koreksi-koreksi. Inilah sistem pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Dalam sistem tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berperan dalam mengkoordinasikan penyusunan repelita dan perencanaan anggaran pembangunan negara yang merupakan bagian dari APBN. Kebijakan pembangunan yang merupakan implementasi dari rencana pembangunan itu dilaksanakan oleh departemen-departemen dan lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) selain Bappenas. Sebagian terbesar dari kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Bappenas berupaya menyumbangkan pemikiran-pemikiran (*moral voices*) mengenai pembangunan nasional, termasuk dalam pelaksanaannya, tidak saja kepada departemen dan LPND tetapi juga kepada masyarakat, melalui berbagai forum. Beberapa pokok pemikiran yang telah disampaikan dalam berbagai kesempatan tersebut disarikan dalam buku ini.

Pokok-pokok pikiran tersebut disajikan dalam tujuh bab yang keseluruhannya mencakup dua puluh lima topik. Bab pendahuluan menguraikan

penjelasan singkat mengenai kesduruhan isi pada masing-masing topik. Di bab kedua, dibahas wawasan pembangunan yang mencakup wawasan kebangsaan dan dimensi akhlak dalam pembangunan nasional serta kepemimpinan dalam wawasan kebangsaan. Pokok bahasan ini menggambarkan kaidah-kaidah yang dianut dalam membangun bangsa. Kaidah-kaidah tersebut merupakan dasar-dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang sesuai dengan jiwa dan jatidiri bangsa Indonesia.

Bab ketiga adalah mengenai arah pembangunan, yang terdiri dari tiga topik. Pembahasan diawali dengan berbagai paradigma pembangunan secara umum, dilanjutkan dengan tinjauan mengenai perkembangan paradigma dan kinerja pembangunan nasional. Uraian dalam bab awal tersebut ditutup dengan menyetengahkan kemajuan, kemandirian, dan keadilan sebagai paradigma pembangunan. Dalam proses pembangunan menuju bangsa yang maju dan mandiri, masyarakat Indonesia akan mengalami suatu transformasi. Proses transformasi tersebut merupakan proses pembangunan dalam jangka panjang. Dalam jangka yang lebih pendek, Indonesia menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang utamanya adalah dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, sebagai penutup dalam bagian ini disajikan beberapa masalah dalam perekonomian memasuki abad ke-21, yang menyiratkan ke mana arah pembangunan menuju.

Pembangunan pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertepatan atau sesuai dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*). Suatu pembangunan dapat berkesinambungan apabila ekonomi rakyat berkembang. Dengan basis perekonomian yang lebih luas (tidak terpusat pada perorangan, sekelompok orang atau perusahaan tertentu), ketahanan perekonomian nasional terhadap goncangan-goncangan ekonomi eksternal dan internal menjadi lebih kukuh. Inti dari semua itu

adalah pentingnya untuk mengembangkan ekonomi rakyat sesuai dengan amanat rakyat dalam GBHN, dan sekaligus mengamankan keberlangsungan pembangunan nasional. Posisi penting pengembangan ekonomi rakyat bagi pembangunan yang berkelanjutan menunjukkan adanya keterpaduan antara pemerataan dan pertumbuhan.

Mengingat pengembangan ekonomi rakyat merupakan pokok permasalahan yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional, maka bab keempat menyajikan hal ini dengan pembahasan yang cukup panjang meliputi sembilan topik. Pertama-tama dibahas terlebih dahulu landasan pengembangan ekonomi rakyat, yaitu demokrasi ekonomi. Pembahasan mengenai ekonomi rakyat ini berturut-turut dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan yang berakarakan kerakyatan, dengan tinjauan khusus mengenai administrasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dan kemudian diuraikan pokok-pokok pikiran tentang koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional serta pengembangan kemitraan usaha, dengan tinjauan khusus mengenai membangun kemitrasejajaran pria dan wanita. Rangkaian strategi dan program pemberdayaan masyarakat, yang meliputi globalisasi dan strategi pengembangan ekonomi rakyat, strategi pengentasan penduduk dari kemiskinan, dan program Inpres Desa Tertinggal, merupakan topik-topik akhir dalam bab empat ini.

Bab kelima membahas salah satu unsur utama dalam mengembangkan ekonomi rakyat yaitu pengembangan sumber daya manusianya. Upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia menjadi semakin penting dalam era industrialisasi yang diwarnai dengan perubahan-perubahan yang cepat, yang terutama ditunjang oleh perubahan teknologi yang pesat. Upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia tersebut perlu disertai dengan strategi ketenagakerjaan yang tepat. Dengan demikian, kemampuan sumber daya manusia yang sudah berhasil ditingkatkan tadi dapat dimanfaatkan dalam pasar tenaga kerja secara produktif. Perlu dicatat bahwa pemanfaatan sumber daya manusia sebagai faktor produksi adalah merupakan satu sisi

dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari sisi lain, peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat akan meningkatkan apresiasi rakyat terhadap kehidupan yang dijalani, yang juga merupakan suatu bagian dari peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembahasan dalam bab lima mengenai pengembangan sumber daya manusia ini terdiri atas tiga topik, yaitu topik tinjauan tentang teknologi, kebudayaan, dan pendidikan dalam pembangunan nasional, topik mengenai pengembangan sumber daya manusia dalam era industrialisasi dan topik mengenai strategi dan kebijaksanaan ketenagakerjaan.

Selanjutnya dalam bab keenam dibahas pembangunan daerah, yang juga harus diperhatikan sebagai salah satu aspek

penting pembangunan nasional dan salah satu dasar penting pengembangan ekonomi rakyat. Dalam pembangunan daerah, masalah pemerataan dan otonomi daerah serta ketimpangan antarkawasan, terutama antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, merupakan masalah yang sudah lama dihadapi. Uraian mengenai kedua hal tersebut merupakan sumbangan pemikiran melengkapi berbagai pemikiran yang sudah banyak dikemukakan oleh berbagai kalangan.

Seluruh rangkaian uraian dalam buku ini akan diakhiri dalam bab penutup, yang merumuskan agenda pembangunan yang penting untuk diperhatikan di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang dibahas dalam buku ini.